

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Seiring dengan perkembangan teknologi dan ekonomi, di setiap negara pasti membutuhkan pemerintahan yang baik atau yang sering disebut *Good Governance*. Pemerintahan yang baik ini merupakan suatu bentuk keberhasilan dalam menjalankan tugas untuk membangun negara sesuai dengan tujuan yang telah direncanakan (Nopianti, 2017). Salah satu bentuk pertanggung jawaban dalam penyelenggaraan pemerintahan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah adalah dengan menyampaikan laporan pertanggung jawaban berupa laporan keuangan. Laporan keuangan yang dihasilkan harus memenuhi prinsip-prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 laporan keuangan dikatakan berkualitas apabila memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan. Adapun karakteristik kualitatif laporan keuangan pemerintah antara lain relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. Apabila informasi yang terdapat didalam laporan keuangan pemerintah daerah memenuhi kriteria karakteristik kualitatif laporan keuangan pemerintah seperti yang disyaratkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, berarti pemerintah daerah mampu meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah tersebut.

Sistem akuntansi yang baik adalah sistem akuntansi yang di dalamnya mengandung sistem pengendalian yang memadai. Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral dari tindakan dan kegiatan yang dilakukan oleh manajemen dan jajarannya untuk memberikan jaminan atau keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan

efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan (Mahmudi, 2016).

Dalam penyusunan laporan keuangan diharapkan berpedoman pada standar yang telah ditentukan, yaitu pada Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Dimana berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan merupakan pedoman di dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan. Standar akuntansi pemerintahan adalah syarat mutlak yang harus dijadikan pedoman agar kualitas laporan keuangan dapat ditingkatkan (Wati, Herawati, & Sinarwati, 2014).

Selain itu dalam penyusunan laporan keuangan juga diperlukan sistem akuntansi. Dimana untuk menghasilkan laporan keuangan daerah dibutuhkan suatu sistem akuntansi keuangan daerah (Wati, Herawati, & Sinarwati, 2014). Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 merupakan serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan, dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) setiap tahunnya mendapat penilaian berupa opini Dari Badan Pengawas Keuangan (BPK). Terdapat empat opini yang diberikan pemeriksa yaitu: Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Opini Tidak Wajar (TP), dan Pernyataan Menolak Memberi Opini atau Tidak Memberi Pendapat (TMP).

Data hasil pemeriksaan BPK perwakilan Sumatera Selatan atas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) sebagaimana disajikan dalam tabel 1.1 dibawah ini.

Tabel 1.1
Perkembangan LKPD Provinsi Sumatera Selatan

Tahun Anggaran	Opini BPK
2007	Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
2008	Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
2009	Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
2010	Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
2011	Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
2012	Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
2013	Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
2014	Wajar Tanpa Pengecualian dengan Paragraf Penjelas (WTP DPP)
2015	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
2016	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
2017	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

Sumber: Ikhtisar Hasil Pemeriksaan BPK RI Tahun Anggaran 2007-2017, 2019.

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa opini BPK terkait LKPD provinsi Sumatera Selatan mengalami peningkatan untuk tahun 2007 sampai tahun 2017 dari opini WDP menjadi opini WTP. Hasil evaluasi BPK RI menunjukkan bahwa LKPD yang belum memperoleh opini WTP disebabkan oleh Penyajian laporan keuangan yang belum sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), belum sepenuhnya diterapkan SAKD sehingga menyebabkan timbulnya kelemahan dalam sistem penyusunan laporan keuangan, kurang memadainya kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) pengelola keuangan pada pemerintah daerah, belum tertatanya barang milik negara/daerah dengan tertib, tidak sesuaiya pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dengan ketentuan yang berlaku, adanya kelemahan sistem pengendalian internal (Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan perwakilan Provinsi Sumatera Selatan). Hal ini terlihat pada laporan keuangan pemerintah daerah tahun 2017 yang menunjukkan bahwa Provinsi Sumatera Selatan telah memperoleh WTP. Namun masih ditemukan kelemahan pada sistem pengendalian intern (SPI) dan ketidakpatuhan terhadap perundang undangan.

Penelitian terdahulu mengenai sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yang telah dilakukan oleh Bagja (2017) dalam penelitiannya menyatakan bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Penelitian Madja, Noholo, & Pakaya (2013) menyatakan bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh negatif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah. Penelitian Mokoginta, Lambey, & Pontoh (2017) menyatakan bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh negatif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah. Penelitian Gumelar (2017) menyatakan bahwa sistem pengendalian intern tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Penelitian Octarinda (2016) menyatakan bahwa sistem pengendalian intern pemerintah tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Penelitian Kusuma (2017) menyatakan bahwa sistem pengendalian intern belum signifikan efektif terhadap kualitas laporan keuangan. Penelitian Dispradani & Nuraini (2018) menyatakan bahwa sistem pengendalian intern memberikan pengaruh yang negatif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Penelitian Kamase & Nasaruddin (2018) menyatakan bahwa penerapan SPIP berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Penelitian Yendrawati (2013) Sistem pengendalian intern tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas informasi laporan keuangan.

Penelitian terdahulu mengenai standar akuntansi pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yang telah dilakukan oleh Nopianti (2017) menyatakan bahwa standar akuntansi pemerintahan berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Penelitian Wati, Herawati, & Sinarwati (2014) menyatakan bahwa standar akuntansi pemerintahan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Penelitian Adhitama (2017) menyatakan bahwa standar akuntansi pemerintahan berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Penelitian Gumelar (2017) menyatakan bahwa standar akuntansi pemerintahan berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Penelitian Hermanto

(2017) menyatakan bahwa standar akuntansi pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Penelitian terdahulu mengenai sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yang telah dilakukan oleh Bagja (2017) menyatakan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Penelitian Wati, Herawati, & Sinarwati (2014) berjudul menyatakan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Penelitian Adhitama (2017) menyatakan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Penelitian Mokoginta, Lambey, & Pontoh (2017) menyatakan bahwa Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Berpengaruh Positif Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah. Penelitian Hermanto (2017) menyatakan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Penelitian Irma (2014) menyatakan bahwa sistem informasi akuntansi keuangan daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Penelitian Octarinda (2016) menyatakan bahwa penerapan sistem informasi akuntansi keuangan daerah tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Penerapan Sistem Pengendalian Intern, Standar Akuntansi Pemerintah dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan”**. Penelitian ini dilakukan pada pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan objek penelitian Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan, maka perumusan masalah yang dibahas adalah:

1. Bagaimana Pengaruh Penerapan Sistem Pengendalian Intern, Standar Akuntansi Pemerintah, dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah daerah Provinsi Sumatera Selatan Secara Parsial ?
2. Bagaimana Pengaruh Penerapan Sistem Pengendalian Intern, Standar Akuntansi Pemerintah, dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan Secara Simultan ?

1.3 Ruang Lingkup Pembahasan

Agar dalam penulisan penelitian ini tidak menyimpang dari permasalahan yang ada, maka peneliti membatasi ruang lingkup pembahasannya sesuai dengan pembahasan tentang pengaruh penerapan sistem pengendalian intern, standar akuntansi pemerintah, sistem akuntansi keuangan daerah, dan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Selain itu peneliti membatasi ruang lingkup pembahasan pada objek penelitian dan responden penelitian hanya pada pegawai di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sumatera Selatan.

4.1 Tujuan dan Manfaat

1.4.1 Tujuan

Sesuai dengan rumusan yang ada, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh penerapan sistem pengendalian intern, standar akuntansi pemerintah, sistem akuntansi keuangan daerah secara parsial terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Untuk mengetahui pengaruh sistem pengendalian intern, standar akuntansi pemerintah dan sistem akuntansi keuangan daerah secara simultan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Provinsi Sumatera Selatan.

4.1.3 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan menambah wawasan penulis mengenai pengaruh sistem pengendalian intern, standar akuntansi pemerintah dan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Sebagai masukan dan gambaran dari pengaruh penerapan sistem pengendalian intern, standar akuntansi pemerintah dan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan badan pengelolaan keuangan dan aset daerah (BPKAD) Provinsi Sumatera Selatan.
3. Dapat memberikan masukan kepada penulis lain yang akan melakukan penelitian sejenis di masa yang akan datang.